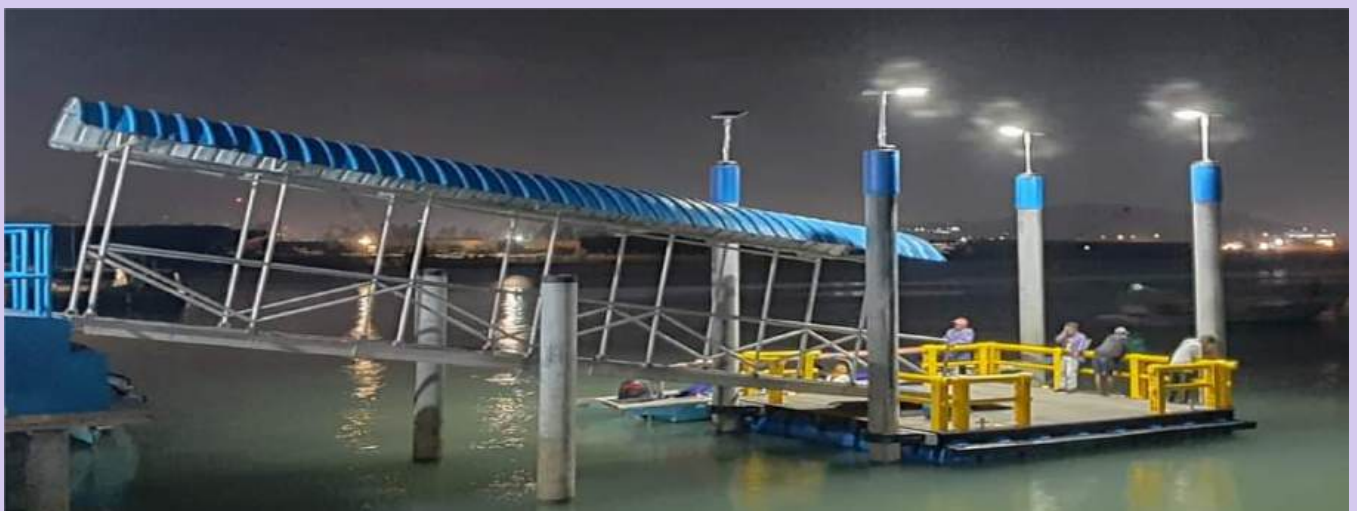




PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Batam, 1 Juli 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TW I 2025	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Maret Tahun 2025	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	15
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	18
BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting	28
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	28
4.3. Rencana Tindak lanjut.....	28

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 s/d Triwulan I..... 8

2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 s/d Triwulan I 15

2.3. Isu-isu Penting Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perhubungan Kota Batam..... 17

3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025..... 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran atau penambahan dan pengurangan anggaran. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran, perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Perhubungan Kota Batam perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Perhubungan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada perubahan RKPD Tahun 2025 setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Maret 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
 - 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 22) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 - 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 25) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
 - 26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
 - 27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
 - 28) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);

- 29) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045;
- 30) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862);
- 31) Peraturan Walikota Batam Nomor 224 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1092);
- 32) Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1. Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
- 2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting
- 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak lanjut

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan. Realisasi capaian program/kegiatan/subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025. Adapun realisasi program/kegiatan/subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perhubungan Tahun 2025 s/d Triwulan I

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
					DINAS PERHUBUNGAN				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	21%	21%
2	15	01	2.02		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	22%	22%
2	15	01	2.02	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/bulan	191 Orang/bulan	100%
2	15	01	2.02	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
2	15	01	2.05		KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	0%	0%
2	15	01	2.05	0009	SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	0%
2	15	01	2.06		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	20%	20%
2	15	01	2.06	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2	15	01	2.06	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	0	0%
2	15	01	2.06	0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	0%
2	15	01	2.06	0005	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0	0%
2	15	01	2.06	0009	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	1 laporan	6%
2	15	01	2.07		KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	10%	10%
2	15	01	2.07	0002	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	0%
3	16	02	2.08	0005	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	0	0%
2	15	01	2.07	0006	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0	0%
2	15	01	2.08		KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	32%	32%
2	15	01	2.08	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	15	01	2.08	0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	4 laporan	31%
2	15	01	2.09		KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	11%	11%
2	15	01	2.09	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
2	15	01	2.09	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 unit	100%
2	15	01	2.09	0006	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	0	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 4. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 5. Jumlah Tukir yang melaksanakan transaksi non tunai	1. 90 % 2. 4710 Unit 3. 80 % 4. 50 % 5. 300 orang	1. 60 % 2. 3110 Unit 3. 12 % 4. 6 % 5.100 Orang	1. 66,67 % 2. 66,03% 3. 15 % 4. 12 % 5. 33,33%
2	15	02	2.02		KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %	2%	2%
2	15	02	2.02	0001	SUB KEGIATAN Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	348 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0003	SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0004	SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	55 Unit	0	0%
2	15	02	2.05		KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	70 %	0%	0%
2	15	02	2.05	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	0	0%
2	15	02	2.05	0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.600 Dokumen	0	0%
2	15	02	2.05	0007	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	0	0%
2	15	02	2.06		KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92 %	56%	61%
2	15	02	2.06	0013	SUB KEGIATAN Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	0	0%
2	15	02	2.06	0016	SUB KEGIATAN Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen	0	0%
2	15	02	2.08		KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100 %	0%	0%
2	15	02	2.08	0004	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	32 Laporan	0	0%
2	15	02	2.08	0007	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	0	0%
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 %	8%	16%
2	15	03	2.12		KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100 %	0%	0%
2	15	03	2.12	0003	SUB KEGIATAN Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	0	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
					UPTD TRANSPORTASI				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	21%	21%
2	15	01	2.10		KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD	100 %	90%	90%
2	15	01	2.10	0001	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	1. 300 Jumlah 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	1. 100 Orang Jukir 2. 3110 Unit 3. 6 % 4. 12 % 5. 60 %	1. 33,33% 2. 66,03% 3. 12% 4. 15% 5. 66,67 %
2	15	02	2.09		KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100 %	90%	90%
2	15	02	2.09	0003	SUB KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	62 Unit	48 Unit	77%
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 %	8%	16%
2	15	03	2.07		KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100 %	113%	113%
2	15	03	2.07	0004	SUB KEGIATAN Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	3 Laporan	100%
					UPTD PELAYANAN PARKIR				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	1. 300 Jumlah 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	1. 100 Orang Jukir 2. 3110 Unit 3. 6 % 4. 12 % 5. 60 %	1. 33,33% 2. 66,03% 3. 12% 4. 15% 5. 66,67 %
2	15	02	2.04		KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	96 %	71%	74%
2	15	02	2.04	0002	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	688 Laporan	637 Laporan	93%

Dari tabel 2.1 terhadap Capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Triwulan I tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah memiliki 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yang mana secara keseluruhan kegiatan dan subkegiatan yang berada dibawah program ini merupakan kegiatan dan sub kegiatan rutin yang terkait dengan gaji, atk, pengadaan peralatan kantor, pembayaran rekening listrik, sppd dan pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor, dan masih ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini yang belum dilaksanakan sehingga banyak tingkat capaian kinerja 0%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi kepegawaian Perangkat
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- 1.1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun

diukur dengan membandingkan jumlah prasarana yang terbangun dan jumlah kebutuhan Prasarana selama 5 Tahun dikali 100%, target tahun 2025 sebesar 90% dan sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 terealisasi sebesar 60% yang masih merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator sampai dengan tahun 2024, sedangkan pada triwulan I tahun 2025 sarana dan prasarana perhubungan masih dalam tahap persiapan pembangunan, seperti peninjauan lokasi, penyusunan data dan pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan perencana, sehingga pekerjaan fisik belum dilaksanakan.

- 1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun

Pencapaian indikator berasal dari jumlah prasarana yang terbangun sampai dengan tahun berjalan, tahun 2025 ditargetkan sebanyak 4.710 unit dan sampai dengan triwulan I telah terbangun sebanyak 3.110 unit yang masih merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator ini sampai

dengan tahun 2024, sedangkan pada triwulan 1 tahun 2025 sarana dan prasarana perhubungan masih dalam tahap persiapan pembangunan. Kegiatan yang mendukung pencapaian kedua indikator kinerja diatas yaitu:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1.3. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji

Untuk Triwulan I Tahun 2025 realisasi kendaraan wajib uji yang lulus uji adalah sebanyak 12% dari target sebesar 80% atau dengan capaian kinerja sebesar 15%. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 kendaraan yang lulus uji di Dinas Perhubungan Kota Batam berjumlah 3.549 unit dari 30.110 unit kendaraan yang wajib uji, hal ini masih dikarenakan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan Penumpang dan Barang masih sangat rendah.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas:

1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

1.4. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam

Perhitungan tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam diperoleh dengan membagi jumlah penumpang bus Trans Batam dengan jumlah daya angkut bus Trans Batam dikali 100%. Pada triwulan I tahun 2025 jumlah penumpang bus Trans Batam baru mencapai 368.309 orang dan jumlah daya angkut sebanyak 5.781.600 orang sehingga baru mencapai 6% dan target yang harus dicapai di Tahun 2025 sebesar 50%.

Minat masyarakat untuk mau naik Trans Batam sebagai satu-satunya transportasi publik yang aman dan nyaman masih harus ditingkatkan, mengingat semakin banyaknya transportasi *online* yang tumbuh di Kota Batam.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas yang berada dibawah UPT Pelayanan Transportasi:

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Pelayanan BLUD

1.5. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai

Tahun 2025 indikator ini memiliki target 300 orang Juru Parkir dengan pola *outsourcing*, pada triwulan I tahun 2025 jumlah Juru Parkir yang telah melayani dengan transaksi non tunai sebanyak 100 orang. Pelaksanaan *outsourcing* terhadap Juru Parkir baru dilaksanakan pada September 2024, sehingga untuk tahun 2025, Juru Parkir yang akan melayani non tunai masih sebanyak 100 orang atau belum ditingkatkan, hal ini dikarenakan pelaksanaan pelayanan parkir non tunai masih dalam tahap uji coba.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas yang berada dibawah UPT Pelayanan Parkir:

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

3. Program Pengelolaan Pelayaran memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

3.1. Persentase Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut

Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut diperoleh dengan membandingkan jumlah masyarakat hinterland yang dilayani dengan angkutan laut dengan jumlah daya angkut angkutan laut dikali 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 8 % dari target sebesar 49% dengan jumlah penumpang transportasi laut sebanyak 4.679 penumpang dan jumlah kapasitas daya angkut sebanyak 57.600 penumpang. Pelayanan mobilitas terhadap masyarakat hinterland oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan dengan mengoperasikan 1 unit Kapal dan 3 Unit Speed Boat. Pada Tahun 2025 ini Dinas Perhubungan melalui UPT Pelayanan Transportasi juga melayani angkutan anak sekolah diwilayah hinterland dengan mengoperasikan 3 unit kapal hibah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas:

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 s.d Triwulan I

NO	INDIKATOR SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2025		REALISASI / PROTEKSI KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2025 TW I		CATATAN ANALISIS
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	Persentase	95	Persentase	66	
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	Persentase	45	Persentase	44	
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	Persentase	106	Persentase	106	

Dari pencapaian kinerja sesuai tabel diatas dapat dijelaskan:

1. Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan dengan target pada tahun 2025 sebesar 95% dan realisasi 66% yang masih merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator sampai dengan Desember tahun 2024.
2. Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota, diperoleh dengan hitungan jumlah Unit Bus Trans Batam yang beroperasi dibagi jumlah kebutuhan Unit Trans Batam yang Beroperasi pada tahun berjalan dikali 100%, pada tahun 2025 jumlah unit bus Trans Batam yang beroperasi sebanyak 48 unit dengan kebutuhan bus untuk 9 koridor sebanyak 108 unit sehingga diperoleh angka realisasi sebesar 44% dengan target 45%.
3. Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland dengan perhitungan jumlah dermaga terbangun dibagi jumlah dermaga yang dibutuhkan dikali 100%. Dengan target tahun 2025 sebesar 106% dan realisasi pada Triwulan I sebesar 106% yang masih merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator sampai dengan Desember tahun 2024. Target jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland sampai dengan tahun 2025 sebanyak 34 Unit yang terdiri dari 21 unit dermaga, 10 unit dermaga ponton dan 3 unit kapal anak sekolah hibah dari Kementerian Sosial pada tahun 2023.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Pada awal tahun 2025 tepatnya pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden terpilih mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini dikeluarkan oleh Presiden dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan daerah. Efisiensi ini diharapkan dapat dicapai melalui pemangkasan belanja yang tidak prioritas dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Sesuai dengan Instruksi Presiden tersebut Dinas Perhubungan mengalami efisiensi sebesar Rp.1.445.209.905,- terhadap kegiatan dan pengadaan rutin operasional kantor lainnya. Sehingga pagu APBD tahun 2025 murni sebesar Rp.101.960.091.580,- setelah mengalami efisiensi menjadi Rp.100.514.881.675,- namun hal ini tidak berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik terkait kepentingan umum dan masyarakat.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kota Batam dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Isu-isu Penting Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	LALU LINTAS		
	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/I/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam
2.	ANGKUTAN JALAN		
	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
3.	PRASARANA PERHUBUNGAN		
	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikam aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana diwilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
	Terlalu besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun dan merehab dermaga	Alokasi Anggaran yang terbatas untuk mendukung pembangunan dan rehab	Kebutuhan konektivitas masyarakat diwilayah hinterland
4.	ANGKUTAN UMUM		
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Jumlah masyarakat yang membutuhkan angkutan Bus Trans Batam
	Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	satu-satu nya bus yang melayani siswa diwilayah hinterland
5.	PARKIR		
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Hampir semua Program dan Kegiatan serta Subkegiatan di Dinas Perhubungan Kota Batam mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran), pagu pada RKPD 2025 sebesar Rp130.088.932.015,- dan mengalami pengurangan pada pembahasan sampai dengan tersusunnya APBD 2025 menjadi Rp.101.960.091.580,- dan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pagu Dinas Perhubungan setelah mengalami efisiensi berkurang menjadi Rp.100.514.881.855,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Perhubungan mengusulkan penambahan pagu menjadi Rp.116.631.979.706,- namun jika dibandingkan dengan RKPD murni 2025 secara keseluruhan, pagu Dinas Perhubungan mengalami penurunan sebesar Rp.13.456.952.307,-.

Rincian Program, kegiatan dan Sub Kegiatan berikut Pagu Perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**TABEL 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM Tahun 2025**

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
				DINAS PERHUBUNGAN									
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	100 %	90%	34.427.833.940,00	40.076.437.925,00	5.648.603.985	
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100%	14.275.669.540,00	23.438.754.245,00	9.163.084.705	
2	15	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		187 Orang/ bulan	191 Orang/ bulan	14.275.669.540,00	23.242.174.245,00	8.966.504.705	
2	15	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana		0	1 Dokumen	0,00	196.580.000,00	196.580.000	
2	15	01	2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	208.777.000,00	24.478.000,00	(184.299.000)	
2	15	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	2 Paket	127.565.000,00	0,00	(127.565.000)	
2	15	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	5 Orang	81.212.000,00	24.478.000,00	(56.734.000)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	238.599.000,00	221.424.000,00	(17.175.000)	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3 Paket	7.976.000,00	57.976.000,00	50.000.000	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	88.217.000,00	68.730.000,00	(19.487.000)	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	38.250.000,00	13.750.000,00	(24.500.000)	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	21.274.000,00	17.800.000,00	(3.474.000)	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	23 Laporan	82.882.000,00	63.168.000,00	(19.714.000)	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	2.752.640.000,00	1.624.195.000,00	(1.128.445.000)	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		5 Unit	3 Unit	2.261.639.000,00	1.252.118.000,00	(1.009.521.000)	
3	16	02	2.08	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		32 Unit	32 Unit	215.555.000,00	215.555.000,00	0	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	17 Unit	275.446.000,00	156.522.000	(118.924.000)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100%	2.219.163.400,00	1.564.840.680,00	(654.322.720)	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	5 Laporan	940.503.000,00	940.503.000,00	0	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		30 Laporan	13 Laporan	1.278.660.400,00	624.337.680,00	(654.322.720)	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	732.985.000,00	702.746.000,00	(30.239.000)	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	38.880.000,00	(3.160.000)	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		98 Unit	60 Unit	615.010.000,00	595.471.000,00	(19.539.000)	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	80 Unit	72.335.000,00	68.395.000,00	(3.940.000)	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	3.600.000,00	0,00	(3.600.000)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	1. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang laik fungsi 2. Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR	1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	1. 15% 2. 52%	77.649.496.380,00	70.380.456.935,00	(7.269.039.445)	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya		100 %	100 %	14.075.629.500,00	3.018.888.092,00	(11.056.741.408)	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		6 Unit	7 Unit	9.693.698.500,00	1.261.625.092,00	(8.432.073.408)	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		348 Unit	348 Unit	3.745.030.000,00	1.120.650.000,00	(2.624.380.000)	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		11 Unit	6 Unit	329.586.000,00	329.586.000,00	0	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		55 Unit	55 Unit	307.315.000,00	307.027.000,00	(288.000)	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Operasional Pelayanan PKB	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	70 %	70%	679.597.880,00	501.532.320,00	(178.065.560)	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		5 Unit	5 Unit	54.597.880,00	0,00	(54.597.880)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peresentase Operasional Pelayanan PKB	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	70 %	70%	679.597.880,00	501.532.320,00	(178.065.560)	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		5 Unit	5 Unit	54.597.880,00	0,00	(54.597.880)	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		12.000 Dokumen	12.000 Dokumen	300.000.000,00	176.532.320,00	(123.467.680)	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		2 Unit	2 Unit	325.000.000,00	325.000.000,00	0	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Persentase terlaksananya pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun	92 %	100%	7.887.896.080,00	16.434.692.580,00	8.546.796.500	
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		1 Unit	2 Unit	282.557.600,00	282.557.600,00	0	
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		3 Dokumen	4 Dokumen	7.605.338.480,00	16.152.134.980,00	8.546.796.500	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas		100 %	100 %	593.600.000,00	1.329.600.000,00	736.000.000	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		32 Laporan	32 Laporan	153.600.000,00	153.600.000,00	0	
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		3 Laporan	1 Laporan	440.000.000,00	1.176.000.000,00	736.000.000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dalam kondisi baik	49 %	69%	18.011.723.615,00	6.162.046.848,00	(11.849.676.767)	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	100 %	4 Unit	14.252.904.900,00	1.315.220.000,00	(12.937.684.900)	
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		6 Unit	0	11.645.144.900,00	0,00	(11.645.144.900)	
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		4 Unit	4 Unit	2.607.760.000,00	1.315.220.000,00	(1.292.540.000)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
					UPTD TRANSPORTASI						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	(13.470.112.227)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	(13.470.112.227)	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	(13.470.112.227)	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	100 %	100 %	34.427.833.940,00	40.076.437.925,00	5.648.603.985	
2	15	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		persentase pelayanan BLUD	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam yang tersedia	100 %	100 %	14.000.000.000,00	12.500.000.000,00	(1.500.000.000)	
2	15	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.000.000.000,00	12.500.000.000,00	(1.500.000.000)	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Persentase peningkatan jumlah penumpang yang dilayani oleh Trans Batam	1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	10%	77.649.496.380,00	70.380.456.935,00	(7.269.039.445)	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	100 %	40%	39.412.652.120,00	36.928.918.743,00	(2.483.733.377)	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		62 Unit	62 Unit	39.412.652.120,00	36.928.918.743,00	(2.483.733.377)	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Persentase peningkatan jumlah penumpang yang dilayani oleh Transportasi Laut yang dikelola oleh Dinas Perhubungan	49 %	3%	18.011.723.615,00	6.162.046.848,00	(11.849.676.767)	
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	100 %	7 Unit	3.758.818.715,00	4.846.826.848,00	1.088.008.133	
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan	2 Laporan	3.758.818.715,00	4.846.826.848,00	1.088.008.133	

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
						SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
						UPTD PELAYANAN PARKIR						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	(13.470.112.227)	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	(13.470.112.227)	
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	(13.470.112.227)	
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Persentase Peningkatan Pelayanan Parkir	1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	5%	77.649.496.380,00	70.380.456.935,00	(7.269.039.445)	
2	15	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRB) Baru	96 %	1.147 SRB	15.000.120.800,00	12.166.825.200,00	(2.833.295.600)	
2	15	02	2.04	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		688 Laporan	12 Laporan	15.000.120.800,00	12.166.825.200,00	(2.833.295.600)	
J U M L A H												130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	(13.470.112.227)	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN								130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00						117.985.951.741,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00							117.985.951.741,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00							117.985.951.741,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	34.427.833.940,00	37.822.844.184,00	40.076.437.925,00	10.066.245.176,00							44.494.079.116,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi				-	100 %	14.275.669.540,00	17.828.587.304,00	23.438.754.245,00	9.163.084.705,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan		26.588.889.076,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				187 Orang/ bulan	191 Orang/ bulan	14.275.669.540,00	17.632.007.304,00	23.242.174.245,00	8.966.504.705,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			26.588.889.076,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	1 Dokumen	0,00	196.580.000,00	196.580.000,00	196.580.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana				-	100 %	208.777.000,00	81.314.000,00	24.478.000,00	-184.299.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan		92.248.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	127.565.000,00	0,00	0,00	-127.565.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	81.212.000,00	81.314.000,00	24.478.000,00	-56.734.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			92.248.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	238.599.000,00	248.603.000,00	221.424.000,00	-17.175.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan		512.133.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	7.976.000,00	7.976.000,00	57.976.000,00	50.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			32.558.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	88.217.000,00	89.583.000,00	68.730.000,00	-19.487.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			92.495.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.250.000,00	17.500.000,00	13.750.000,00	-24.500.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			42.075.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	21.274.000,00	21.274.000,00	17.800.000,00	-3.474.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			22.005.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	23 Laporan	82.882.000,00	112.270.000,00	63.168.000,00	-19.714.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			323.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi				-	100 %	2.752.640.000,00	1.608.669.000,00	1.624.195.000,00	-1.128.445.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan		1.289.865.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	3 Unit	2.261.639.000,00	1.252.118.000,00	1.252.118.000,00	-1.009.521.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			984.255.800,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	215.555.000,00	215.555.000,00	215.555.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			146.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	17 Unit	275.446.000,00	140.996.000,00	156.522.000,00	-118.924.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			158.989.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi				-	100 %	2.219.163.400,00	1.964.840.680,00	1.564.840.680,00	-654.322.720,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan		1.594.463.128,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	5 Laporan	940.503.000,00	940.503.000,00	940.503.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			940.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	13 Laporan	1.278.660.400,00	1.024.337.680,00	624.337.680,00	-654.322.720,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			653.913.128,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi				-	100 %	732.985.000,00	762.164.000,00	702.746.000,00	-30.239.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perhubungan		854.947.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	-3.160.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			46.244.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				98 Unit	60 Unit	615.010.000,00	608.509.000,00	595.471.000,00	-19.539.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			676.511.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	72.335.000,00	114.775.000,00	68.395.000,00	-3.940.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			132.192.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				-	300 4710 50 80 90 Jumlah Unit % % %	77.649.496.380,00	58.523.180.548,00	70.380.456.935,00	-15.077.347.091,00							62.572.149.289,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya				-	100 %	14.075.629.500,00	2.821.778.500,00	3.018.888.092,00	-11.056.741.408,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		3.477.186.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				6 Unit	7 Unit	9.693.698.500,00	1.064.227.500,00	1.261.625.092,00	-8.432.073.408,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			1.409.357.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				348 Unit	348 Unit	3.745.030.000,00	1.120.650.000,00	1.120.650.000,00	-2.624.380.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			1.367.237.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				11 Unit	6 Unit	329.586.000,00	329.586.000,00	329.586.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			362.544.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				55 Unit	55 Unit	307.315.000,00	307.315.000,00	307.027.000,00	-288.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			338.046.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peresentase Operasional Pelayanan PKB				-	70 %	679.597.880,00	679.575.000,00	501.532.320,00	-178.065.560,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		717.491.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	54.597.880,00	0.00	0.00	-54.597.880,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			0.00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12000 Dokumen	12000 Dokumen	300.000.000,00	354.575.000,00	176.532.320,00	-123.467.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			417.491.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota				-	92 %	7.887.896.080,00	5.694.178.880,00	16.434.692.580,00	8.546.796.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		7.298.929.160,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																			
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				1 Unit	2 Unit	282.557.600,00	282.557.600,00	282.557.600,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			310.813.360,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				3 Dokumen	4 Dokumen	7.605.338.480,00	5.411.621.280,00	16.152.134.980,00	8.546.796.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			6.988.115.800,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penerbitan Lalu Lintas				-	100 %	593.600.000,00	3.025.200.000,00	1.329.600.000,00	736.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		336.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				32 Laporan	32 Laporan	153.600.000,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			336.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				3 Laporan	1 Laporan	440.000.000,00	2.871.600.000,00	1.176.000.000,00	736.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut				-	49 %	18.011.723.615,00	5.614.066.848,00	6.162.046.848,00	-7.092.000.279,00							10.919.723.336,00	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik				-	100 %	14.252.904.900,00	1.349.240.000,00	1.315.220.000,00	-12.937.684.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		6.785.022.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				6 Unit	2 Unit	11.645.144.900,00	0,00	0,00	-11.645.144.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			5.300.858.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	2.607.760.000,00	1.349.240.000,00	1.315.220.000,00	-1.292.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			1.484.164.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD TRANSPORTASI								130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00						117.985.951.741,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00							117.985.951.741,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00							117.985.951.741,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 %	34.427.833.940,00	37.822.844.184,00	40.076.437.925,00	10.066.245.176,00							44.494.079.116,00	
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD				-	100 %	14.000.000.000,00	15.328.666.200,00	12.500.000.000,00	-1.500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	Masyarakat		13.561.532.812,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.000.000.000,00	15.328.666.200,00	12.500.000.000,00	-1.500.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi 02. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi			13.561.532.812,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				-	300 4.710 50 80 90 Jumlah Unit % % %	77.649.496.380,00	58.523.180.548,00	70.380.456.935,00	-15.077.347.091,00							62.572.149.289,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)				100 %	100 %	39.412.652.120,00	37.010.322.968,00	36.928.918.743,00	-2.483.733.377,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		40.870.743.309,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				62 Unit	62 Unit	39.412.652.120,00	37.010.322.968,00	36.928.918.743,00	-2.483.733.377,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			40.870.743.309,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut				-	49 %	18.011.723.615,00	5.614.066.848,00	6.162.046.848,00	-7.092.000.279,00							10.919.723.336,00		
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut				-	100 %	3.758.818.715,00	4.264.826.848,00	4.846.826.848,00	1.088.008.133,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		4.134.700.586,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	3.758.818.715,00	4.264.826.848,00	4.846.826.848,00	1.088.008.133,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			4.134.700.586,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		UPTD PELAYANAN PARKIR								130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00					117.985.951.741,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00							117.985.951.741,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00							117.985.951.741,00		
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun				-	300 4710 50 80 90 Jumlah Unit % % %	77.649.496.380,00	58.523.180.548,00	70.380.456.935,00	-15.077.347.091,00							62.572.149.289,00		
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola				-	96 %	15.000.120.800,00	9.292.125.200,00	12.166.825.200,00	-2.833.295.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah	Masyarakat		9.871.799.520,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				688 Laporan	688 Laporan	15.000.120.800,00	9.292.125.200,00	12.166.825.200,00	-2.833.295.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah 01. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah			9.871.799.520,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		J U M L A H							130.089.053.935,00	101.960.091.580,00	116.618.941.708,00	-88.653.492.797,00					117.985.951.741,00				

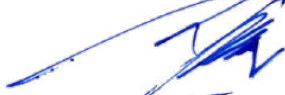
Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda				
2.	Pengolahan data dan informasi.	Ada			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	Ada			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	Ada			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	Ada			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	Ada			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	Ada			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	Ada			

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



SALIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681021 199010 1 001



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 469 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH SE-KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai Surat Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Nomor B/122/000.7.2.4/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Perangkat Daerah se-Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2 . Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH SE-KOTA BATAM.

KESATU : Susunan keanggotaan dan daftar Perangkat Daerah Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Perangkat Daerah se-Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Perangkat Daerah se-Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2026;
2. menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2026;
3. menghadiri forum Perangkat Daerah;
4. menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2026;
5. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2026;
6. menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2025;
7. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2025; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

KETIGA . . .

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Perangkat Daerah se-Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai uraian tugas:

1. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025; dan
 - b. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Wali Kota Batam.
2. Sekretaris:
 - a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan Tim Penyusun; dan
 - c. menerima, mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
3. Anggota:
 - a. mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024;
 - b. melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d. melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026;
 - e. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan serta sub kegiatan;
 - f. merumuskan kegiatan prioritas Tahun 2026; dan
 - g. mengikuti pembahasan dengan kemitraan (TAPD Perencanaan dan Penganggaran) terkait kesesuaian rancangan dengan dokumen perencanaan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Desember 2024

WALI KOTA BATAM

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 469 TAHUN 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH SE-KOTA
BATAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH SE-KOTA BATAM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Daerah/Kepala Satpol PP/Camat
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas/ Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat/Sekretaris Satpol PP/Sekretaris Camat
3		Kepala Bagian Perencanaan Keuangan/Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Kelompok Kerja	Seluruh Kepala Bidang dan Bagian pada Perangkat Daerah
5	Anggota	Seluruh Kepala UPTD pada Perangkat Daerah
		Seluruh Jabatan Fungsional Perencana pada Perangkat Daerah
		Seluruh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Perangkat Daerah
		Seluruh Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Seluruh Pelaksana pada Perangkat Daerah

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI

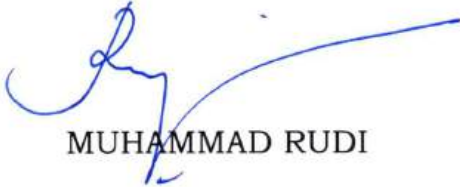
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 469 TAHUN 2024
 TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN
 RENCANA KERJA TAHUN 2025
 PERANGKAT DAERAH SE-KOTA
 BATAM

DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Badan Pendapatan Daerah
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
12	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
15	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
16	Dinas Kesehatan
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
20	Dinas Lingkungan Hidup
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	Dinas Pendidikan
25	Dinas Perhubungan
26	Dinas Perikanan
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Dinas Pertanahan
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan
31	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
32	Dinas Tenaga Kerja
33	Satuan Polisi Pamong Praja
34	Kecamatan Batam Kota
35	Kecamatan Batu Aji
36	Kecamatan Batu Ampar
37	Kecamatan Belakang Padang

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
38	Kecamatan Bengkong
39	Kecamatan Bulang
40	Kecamatan Galang
41	Kecamatan Lubuk Baja
42	Kecamatan Nongsa
43	Kecamatan Sagulung
44	Kecamatan Sekupang
45	Kecamatan Sungai Beduk

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI